



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## TUGAS AKHIR

### TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK AIR PERMUKAAN DI UPT

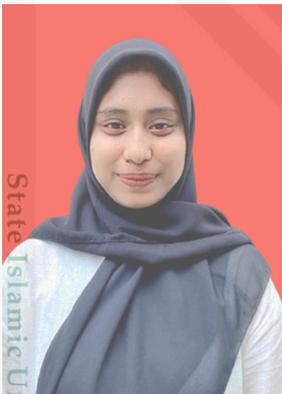
### PENGELOLAAN PENDAPATAN

### BANGKINANG

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)  
Pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

**NUR AISYAH**

02170623758



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Nama : NUR AISYAH  
Nim : 02170623758  
Program Studi : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
Judul : TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK AIR PERMUKAAN DI UPT  
PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG

Pekanbaru, 16 Mei 2024

Disetujui Oleh:

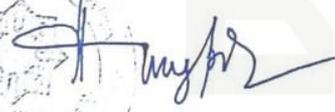
PEMBIMBING

Dr. Muhammad April, S.H., M.H

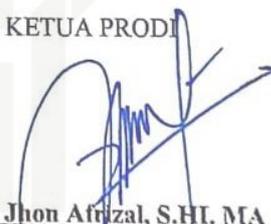
NIP.19860405202321 1 018

MENGETAHUI

DEKAN

  
Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM  
NIP.19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

  
Dr. Jhon Afrizal, S.H.I. MA  
NIP.19790911 201101 1 003

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN Suska Riau Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : NUR AISYAH  
NIM : 02170623758  
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
SEMESTER : VI (ENAM)  
JUDUL : TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK AIR  
PERMUKAAN DI UPT PENGELOLAAN  
PENDAPATAN BANGKINANG  
TANGGAL UJIAN : 16 MEI 2024

Tim Penguji

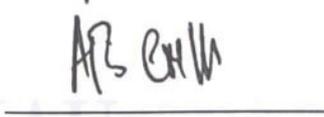
Ketua  
Dr. Jhon Afrizal, S.HI., MA  
NIP. 19790911 201101 1 003



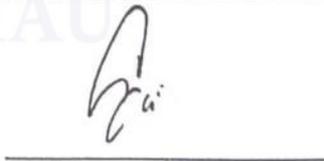
Sekretaris  
Zikri Aidilla Syarli, SE., M. Ak  
NIP. 19940523 202203 2 004



Penguji I  
Ari Nurwahidah, SE., MM  
NIP 19780 05 200710 2 002



Penguji II  
Sahwitri Andani, S.E., M.Si  
NIP. 19820806 200604 2 002



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Surat : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NIUR AISYAH

Nim : 02170623758

Tempat/Tanggal Lahir : Langgam, 16. Oktober 2003

Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu sosial

Prodi : D-III Administrasi Perpajakan

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya":

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Air Permukaan Di UPT Pengelolaan  
Pendapatan Bangkinang.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11, Juni, 2021

Yang membuat pernyataan



NIM : 02170623758

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK AIR PERMUKAAN DI UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG

OLEH:

NUR AISYAH

NIM. 02170623758

*This research was carried out at the Bangkinang Revenue Management UPT from January 2024 to May 2024. The aim of this research was to determine the level of mandatory compliance with Surface Water Tax at the Bangkinang Revenue Management UPT. In this research the data obtained is primary and secondary data. The author uses data collection methods by means of observation, interviews and documentation. and the results of this research show that in the tax collection system, taxpayers are obedient in paying the taxes they owe in accordance with government regulations. And no taxpayer has yet been subject to administrative sanctions for late payment of the tax they owe. The efforts made by the Bangkinang Revenue Management UPT to increase surface water tax collection are by establishing good communication with taxpayers before the due date for paying the tax owed, the UPT has reminded Surface Water Tax payers.*

**Keywords: Taxpayer Compliance, Surface Water Tax**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK AIR PERMUKAAN DI UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG

OLEH:

NUR AISYAH

NIM. 02170623758

Penelitian ini dilaksanakan di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang pada bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib Pajak Air Permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang. Dalam penelitian ini data yang didapat adalah data primer dan sekunder. Penulis menggunakan metode pengambilan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam sistem pemungutan pajak, wajib pajak sudah patuh melakukan pembayaran pajak terutang nya sesuai dengan peraturan pemerintah. Dan belum ada wajib pajak yang terkena sanksi administrasi terhadap keterlambatan pembayaran pajak terutangnya. Upaya yang dilakukan UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang untuk meningkatkan pemungutan pajak air permukaan yaitu dengan cara menjalin komunikasi yang baik dengan wajib pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran pajak terutang, pihak UPT sudah mengingatkan kepada wajib Pajak Air Permukaan.

**Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Air Permukaan**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah subhanallah wata'ala yang telah membirikan nikmat, terutama nikmat Kesehatan dan kesempatan kepada penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan proses pembuatan Tugas Akhir ini dengan baik dan tepat waktu, shalawat serta salam tidak lupa pula penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita senantiasa mendapatkan syafa'at dari baginda Rasulullah SAW.

Alhamdulillahirobbil'alamin atas rahmat dan karunia yang diberikan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “ **Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Air Permukaan Di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang**” tugas akhir ini di susun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada program studi D-III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini penulis banyak mendapatkan dukungan, dan bimbingan serta masukan dari berbagai pihak terutama Teruntuk yang teristimewah kepada orang tua tercinta penulis yaitu ayahanda tercinta H. Muhammad Ali dan ibunda Hj. Jasmanidar yang telah merawat, membesarkan dan mendidik penulis hingga saat ini serta memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini atas jasa dan kasih sayang mereka yang tiada

hentinya mereka curahkan, terimakasih atas doa yang tiada putus untuk penulis. Dan pada kesempatan ini penulis tidak lupa juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Khairunnas Rajab M. Ag selaku Rektorat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta pembantu rector I, II, III yang telah memberikan waktu kepada penulis untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi ini
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Hj. Julina, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.Hi, Ma selaku Ketua Jurusan Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pengarahan kepada penulis sehingga dapat melaksanakan Tugas Akhir ini.
7. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si selaku Sekretasi Jurusan Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas



Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pengarahan kepada penulis sehingga dapat melaksanakan Tugas Akhir ini.

8. Bapak Dr. Muhammad April, SH, M.Hum selaku pembimbing Tugas Akhir penulis yang telah meluangkan waktu, banyak memberikan bimbingan serta saran-saran dengan baik, Ikhlas, dan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Ibu Ari Nurwahidah SE selaku Penasehat Akademik penulis selama menempuh Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan nasihat dan arahan kepada penulis.
10. Para Dosen Jurusan Diploma III Administrasi Perpajakan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingannya yang sangat berharga bagi penulis selama masa perkuliahan.
11. Seluruh Staf Jurusan Diploma III Administrasi Perpajakan dan Staf Akademik di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Bapak Zulfahmi M.Pd dan Kakak Meri Yeni SE selaku kepala kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang dan bagian dari pajak air permukaan yang telah membantu dan mempermudah penulis pada saat penelitian.
13. Kepada kakak dan abang ( Yati, Erma, Azizah, Abdi, dan Yuli) dan keponakan tercinta ( Dahlia, Aulia, Aqila, Halim, adit, Emir, Afqi, hanum) yang telah membirikan dukungan penuh kepada penulis.
14. Kepada teman seperjuangan Administrasi Perpajakan terkhususnya kepada ( Sovia, Anugrah, cinta, Salmi, Resia, salsa, yesri) yang telah memberikan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dukungan dan semangat bagi penulis sehingga bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan menjadi amal baik dan akan mendapatkan balasan yang baik pula dari Allah subhanallah wa'ta'ala. Dan penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh sebab itu, saran dan perbaikan dari pembaca dengan senang penulis terima dan diiringi ucapan terimakasih. Semoga Tugas Akhir ini bisa bermanfaat bagi pembaca.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu

Kampar, 5 Mei 2024

Penulis

**NUR AISYAH**

NIM. 02170623758

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| <b>ABSTRAK</b> .....   | i    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | ii   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | vi   |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....  | viii |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....   | ix   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....   | 1    |
| 1.1 Latar Belakang .....   | 1    |
| 1.2 Rumusan Masalah .....  | 8    |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....  | 8    |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....   | 9    |
| 1.5 Metode Penelitian .....  | 9    |
| 1.5.1 Lokasi Penelitian.....   | 9    |
| 1.5.2 Waktu Penelitian.....  | 9    |
| 1.5.3 Jenis Data Penelitian.....   | 10   |
| 1.5.4 Teknik Pengumpulan Data.....                                       | 10   |
| 1.5.5 Analisis Data.....   | 11   |
| 1.6 Sistematika Penulisan.....   | 11   |
| <b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....                      | 13   |
| 2.1 Sejarah UPT. Pengelolaan Pendapatan Bangkinang .....                 | 13   |
| 2.2 Struktur Organisasi UPT. Pengelolaan Pendapatan Bangkinang .....     | 14   |
| 2.3 Visi dan Misi UPT. Pengelolaan Pendapatan Bangkinang .....           | 16   |
| 2.4 Uraian Tugas Unit Kerja UPT. Pengelolaan Pendapatan Bangkinang ..... | 16   |
| <b>BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK</b> .....                          | 20   |
| 3.1 Tinjauan Teori.....  | 20   |
| 3.1.1 Pengertian Pajak.....  | 20   |
| 3.1.2 Fungsi Pajak.....  | 21   |
| 3.1.3 Sistem Pemungutan Pajak.....                                       | 22   |
| 3.1.4 Jenis-Jenis Pajak.....   | 24   |

|   |           |
|---|-----------|
| 3.1.5 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....   | 26        |
| 3.1.6 Pengertian Pajak Air Permukaan.....   | 28        |
| 3.1.7 Pengertian Pajak Air Bawah Tanah.....   | 29        |
| 3.1.8 Dasar Hukum Pajak Air Permukaan .....   | 29        |
| 3.1.9 Objek Pajak Air Permukaan.....  | 30        |
| 3.1.10 Bukan Objek Pajak Air Permukaan .....  | 30        |
| 3.1.11 Subjek Pajak Air Permukaan .....   | 30        |
| 3.1.12 Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan .....  | 31        |
| 3.1.13 Proses Pemungutan Pajak Air Permukaan.....   | 36        |
| 3.1.14 Perhitungan Pajak Air Permukaan.....   | 39        |
| 3.1.15 Pajak Menurut Pandangan Islam .....  | 40        |
| 3.2 Tinjauan Praktek .....  | 43        |
| 3.2.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Air Permukaan di UPT.<br>Pengelolaan Pendapatan Bangkinang .....                        | 43        |
| 3.2.2 Upaya Yang Dilakukan UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang<br>Untuk Meningkatkan Pemungutan Pajak Air Permukaan ..... | 44        |
| 3.2.3 Perbandingan Antara Tinjauan Teori dan Praktek.....   | 47        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>   | <b>50</b> |
| 4.1 Kesimpulan .....  | 50        |
| 4.2 Saran .....   | 51        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>52</b> |

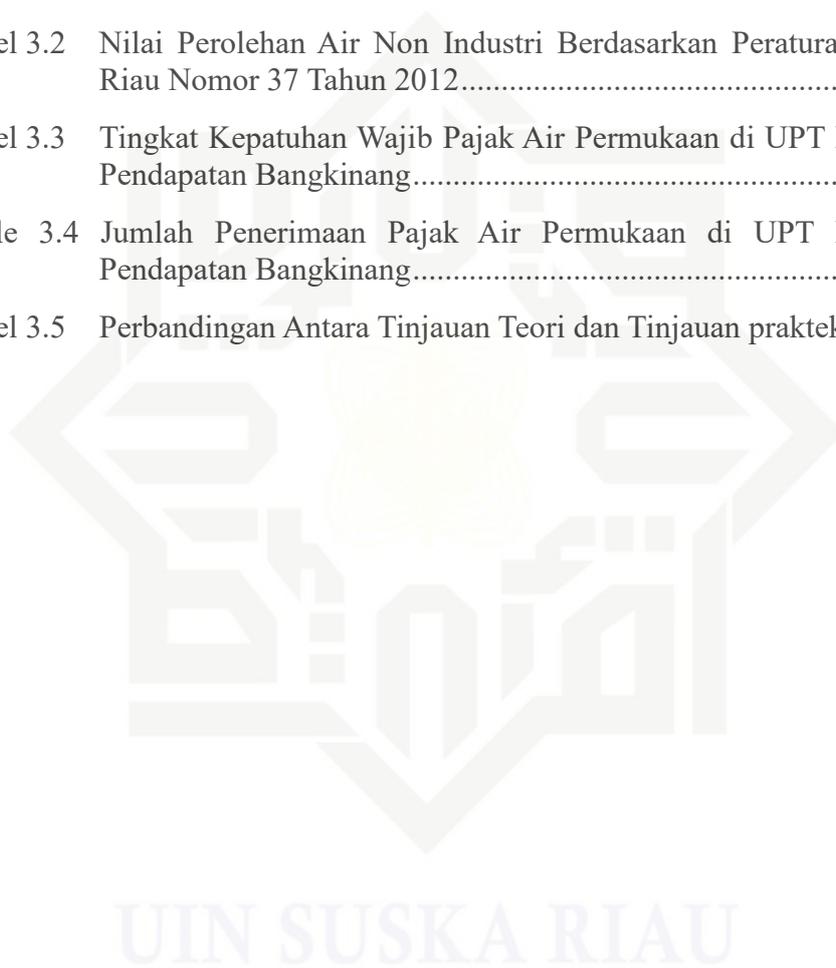
**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR TABEL

|           |  |    |
|-----------|--|----|
| Tabel 1.1 | Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang .....           | 4  |
| Tabel 1.2 | Daftar Wajib Pajak Badan Perusahaan yang Terdaftar di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang Tahun 2023 ..... | 5  |
| Tabel 3.1 | Nilai Perolehan Air Industri Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 37 Tahun 2012 .....                   | 33 |
| Tabel 3.2 | Nilai Perolehan Air Non Industri Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 37 Tahun 2012.....                | 35 |
| Tabel 3.3 | Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Air Permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang.....                    | 44 |
| Table 3.4 | Jumlah Penerimaan Pajak Air Permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang.....                          | 44 |
| Tabel 3.5 | Perbandingan Antara Tinjauan Teori dan Tinjauan praktek.....   | 47 |



## DAFTAR GAMBAR

|            |   |    |
|------------|---|----|
| Gambar 2.1 | Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang .....                         | 5  |
| Gambar 3.1 | Proses Pemungutan Pajak Air Permukaan di UPT Pengelolaan<br>Pendapatan Bangkinang ..... | 37 |
| Gambar 3.2 | Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) .....  | 46 |



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berkembang, yang menerapkan pajak dan menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan terbesar dalam penerimaan kas negara penerimaan pajak mendorong pemerintahan indonesia untuk membiayai Pembangunan nasional demi meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Negara indonesia menerapkan dua jenis pajak yaitu pajak pusat dan pajak daerah. pajak pusat dikelola pemerintah pusat sebagai sumber penerimaan negara di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan pajak daerah dikelola pemerintah daerah sebagai sumber penerimaan daerah di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Menurut Lestari dalam Sri Rahayu Syah (2016).

Dalam melaksanakan Pembangunan nasional, pemerinta tidak bisa melakukan pemerataan secara efektif ke berbagai daerah tanpa adanya kerjasama dengan baik dengan daerah tersebut . pemerinta pusat memberikan kewewenwng terhadap pemerintah daerah untuk menggali potensi yang ada didalam derahnya sebaik mungkin sebagai sumber penerimaan kas daerah untuk melakukan Pembangunan di daerah tersebut .

Keberhasilan Pembangunan di sebuah daerah ditentukan oleh tersedianya dana guna untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan Masyarakat. Pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut direktorat jendral perimbangan

keuangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lain adalah PAD yang sah. Peningkatan kesejahteraan Masyarakat dapat dilihat dengan meningkatnya kemampuan Masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

Pajak dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 01 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Jenis pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota . Adapun Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang merupakan jenis pajak provinsi bagian dari pajak daerah yang menjadi sumber dana penerimaan kas daerah.

Pengenaan Pajak Air Permukaan tidak mutlak ada pada seluruh daerah provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak provinsi. Karena itu untuk dapat dipungut pada suatu daerah provinsi, maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Air Permukaan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Air Permukaan di daerah provinsi yang bersangkutan.

Dalam peraturan Gubernur Riau No.37 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 5 Pajak Air Permukaan (PAP) adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah sebuah air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut baik yang berada di laut maupun di darat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dikecualikan pengambilan atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan atau pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dan objeknya adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan tarif yang dikenakan paling tinggi adalah sebesar 10 %.

Pajak air permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang merupakan dari bagian upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan sumber daya alam. Pajak Air Permukaan dikenakan terhadap segala jenis usaha yang memanfaatkan air permukaan seperti Sungai, waduk, danau, dan saluran irigasi. Pajak ini dikelola oleh pemerintah provinsi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang memiliki tugas untuk memastikan penetapan dan pemungutan Pajak Air Permukaan berjalan dengan efektif. Permasalahan yang terjadi adalah realisasi penerimaan pajak air permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Kepatuhan dalam membayar pajak adalah suatu tindakan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam pemungutan pajak air permukaan di

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



lingkup UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang mencakup beberapa kecamatan yaitu. kecamatan gunung sahilan, kecamatan koto Kampar hulu, kecamatan tapung, kecamatan kampa, kecamatan tambang, kecamatan tapung hulu, kecamatan salo, kecamatan bangkinang barat dan kecamatan bangkinang.

**Tabel 1.1 Data Target Realisasi Pajak Air Permukaan Di UPT  
Pengelolaan Pendapatan Bangkinang Tahun 2021 Sampai Tahun 2023**

| No | Tahun | Target (Rp)   | Realisasi (Rp) | Persentase |
|----|-------|---------------|----------------|------------|
| 1. | 2021  | 498.436.188   | 4.151.227.822  | 114,5 %    |
| 2. | 2022  | 4.878.722.357 | 2.751.036.940  | 56,38%     |
| 3. | 2023  | 3.240.777.939 | 3.220.701937   | 99,38%     |

Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang 2024.

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan mengalami naik turun target yang tertinggi ditetapkan pada tahun 2022, sedangkan realisasi tiga tahun terakhir mengalami naik turun di mana pada tahun 2021 jumlah realisasi yang dicapai jauh melibehi target dengan persentasenya sebesar 114,5%. Dan pada tahun 2022 realisasinya tidak mencapai target karena target yang ditetapkan terlalu tinggi dan persentasenya sebesar 56,38%, dan pada tahun 2023 realisasinya mengalami peningkatan dan target pada tahun 2023 diturunkan sehigga persentasenya mengalami peningkatan sebesar 99,38%.

Dalam mewujudkan Pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu menghimpun sumber dana untuk membiayai kegiatan dan Pembangunan di daerah salah satunya melalui pajak daerah, pajak daerah yang nantinya telah

dipungut dikumpulkan kemudian dialokasikan dan didistribusikan untuk Pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat setempat. Untuk pelaksanaan pemungutan dan retribusi daerah, kesalahan masih ditemukan pada kesadaran wajib pajak yang masih rendah, sehingga membutuhkan partisipasi dan Upaya dalam pemungutan pajak.

**Tabel 1.2 Daftar Wajib Pajak Badan Perusahaan yang Terdaftar di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang Tahun 2023.**

| No | Nama Perusahaan / Wajib Pajak     | Alamat Perusahaan                        | Jenis Olahan |
|----|-----------------------------------|--|--------------|
| 1. | PT. Adimulia Agrolestari          | Desa gunung Mulya<br>kec.gunung sahlan   | PKS          |
| 2. | PT. Padasa Enam Utama             | Desa siberuang, kec.<br>Koto Kampar hulu | PKS          |
| 3. | PT. Riau Kampar Sahabat<br>Sejati | Desa Suka Ramai kec.<br>Tapung           | PKS          |
| 4. | PT. Tasma Puja                    | Desa Kampar, Kec<br>Kampa                | PKS          |
| 5. | PT. Tunggal Yunus Estate          | Desa Petapahan, kec.<br>Tapung           | PKS          |
| 6. | PT. Multi Agro Sentosa            | Desa Danau Lancang<br>Kec. Tambang       | PKS          |
| 7. | PT. Subur Arum Makmur             | Desa Danau Lancang<br>Kec. Tapung Hulu   | PKS          |
| 8. | PT. Ciliandra Perkasa             | Desa Siabu Kec. Salo                     | PKS          |
| 9. | PT. Arindo Trisejahtera           | Desa Petapahan Kec.<br>Tapung            | PKS          |

|     |                                      |  |       |
|-----|--------------------------------------|--|-------|
| 10. | PT. Johan Sentosa                    | Desa Sei Jernih Kec.<br>Bangkinang Barat | PKS   |
| 11. | PT. RAPP ( Estate Teso<br>Timur)     | Desa Gunung Sari Kec.<br>Gunung Sahilan  | Kebun |
| 12. | PT. Sewangi Sejati Luhur             | Desa Senama Nenek<br>Kec. Tapung         | PKS   |
| 13. | PT. Mitra Bumi                       | Desa Bukit Sembilan<br>Kec. Bangkinang   | PKS   |
| 14. | PT. PDAM Tirta Kampar                | Jl. Sudirman Bangkinang                  | PDAM  |
| 15. | PT. PLN Persero PLTA Koto<br>Panjang | Jl.Tanjung Datuk No. 74<br>Pekanbaru     | PLTA  |
| 16. | PT. Air Kampar                       | Desa Pulau Birandang<br>Kec. Kampa       | PKS   |

*Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang 2024.*

Berdasarkan Tabel 1.2 UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang memiliki 16 perusahaan yang menjadi wajib pajak air permukaan yaitu PT. Adimulia Agrolestari dengan jenis olahan PKS ( Pabrik Kelapa Sawit ), PT. Padasa Enam Utama dengan jenis olahan PKS, PT. Riau Kampar Sahabat Sejati dengan jenis olahan PKS, PT. Tasma Puja dengan jenis olahan PKS, PT. Tunggal Yunus Estate dengan jenis olahan PKS, PT. Multi Agro Sentosa dengan jenis olahan PKS, PT. Subur Arum Makmur dengan jenis olahan PKS, PT. Ciliandra Perkasa dengan jenis olahan PKS, PT. Arindo Trisejahtera dengan jenis olahan PKS, PT. Johan Sentosa dengan jenis olahan PKS, PT. RAPP (Estate Teso Timur) dengan jenis olahan kebun, PT. Sewangi Sejati Luhur dengan jenis olahan PKS, PT. Mitra Bumi dengan jenis olahan PKS, PT. PDAM Tirta Kampar dengan jenis olahan PDAM,

PT. PLN Persero PLTA Koto Panjang dengan jenis olahan PLTA, PT. Air Kampar dengan jenis olahan PKS . Hampir semua Perusahaan jenis olahannya sama Tetapi ada beberapa PT yang mengelolah Perkebunan, PDAM, dan PLTA.

Dalam hal ini penulis ingin mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak air permukaan di UPT. Pengelolaan Pendapatan Bangkinang. Dimana kepatuhan wajib pajak air permukaan ini berkaitan badan perusahaan belum taat dalam melakukan pembayaran Pajak Air Permukaan, keadaan lain terjadi karena kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang pajak air permukaan seperti bagaimana kriteria usaha yang dimiliki tersebut dapat dikenai Pajak Air Permukaan, dan kewajiban wajib pajak melaporkan pajak terutangnya dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam mengetahui dampak dari patuhnya membayar pajak bagi kemajuan pembangunan suatu daerah dan kenyamanan wajib pajak hingga mencapai kemakmuran. Oleh karena itu, diperlukannya peran pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut agar meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Air Permukaan. Melihat tingkat kepatuhan wajib pajak air permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang yang semakin menurun.UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang agar melakukan Upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan upaya agar wajib pajak tidak melalaikan kewajibannya untuk menaati peraturan perundang-undangan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan Latar Belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menjadikan sebuah karya tulis ilmiah dengan judul **“TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK AIR PERMUKAAN DI UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG”**

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan merumuskan permasalahan yang akan di bahas sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak air permukaan di UPT pengelolaan Pendapatan Bangkinang?
2. Apa saja upaya yang di lakukan UPT Pengelolaan pendapatan Bangkinang untuk meningkatkan pemungutan Pajak Air Permukaan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak air permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang.
2. Untuk mengetahui Upaya yang di lakukan UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang untuk meningkatkan pemungutan pajak air permukaan.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yaitu :

1. Bagi penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan perpajakan yang di peroleh di UIN Suska Riau dan menambah wawasan penulis khususnya

tentang Pajak Air Permukaan yaitu mengenai kepatuhan wajib pajak Air permukaan .

2. Bagi UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang diharapkan penelitian ini dapat membantu dan dapat memberikan masukan sebagai pertimbangan dalam usaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak Air Permukaan.
3. Bagi pembaca diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dalam bidang perpajakan terutama dibidang pajak air permukaan dan juga dapat di jadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang yang terletak di Jl. Letnan Boyak No. 74 Langgini, Kec.Bangkinang, Kabupaten Kampar Riau 28463.

### 1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai pada bulan Februari 2024 sampai dengan mei 2024.

### 1.5.3 Jenis Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Data primer diperoleh penulis secara langsung

melalui wawancara kepada kepala UPT. Pengelolaan Pendapatan Bangkinang. Adapun data primer yang diperlukan yaitu data tentang pajak air permukaan seperti realisasi anggaran pajak air permukaan, jumlah wajib pajak yang terdaftar, dan lainnya.

b. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti bentuk dokumen, arsip-arsip catatan, buku-buku referensi yang berhubungan dengan penulisan.

#### 1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi Pengumpulan data dengan cara mengamati langsung objek yang menjadi permasalahan dalam penelitian. Penulis melakukan observasi terhadap pajak air permukaan di UPT. Pengelolaan Pendapatan Bangkinang
2. Wawancara Pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.
3. Dokumentasi Pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan data dengan mengambil data dari arsip maupun catatan dokumentasi lainnya dari tempat penelitian sesuai dengan masalah yang penulis teliti.

#### 1.5.4 Analisis Data

Adapun analisis data penulis melakukan analisis pada data yang diperoleh dengan menggunakan metode Deskriptif, yaitu menganalisis data yang sudah ada dengan teori yang mendukung.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan laporan dan pembahasan isi materi laporan tugas akhir ini, penulis akan membagi sistematika penulisan dalam empat bab. Adapun yang menjadi sistematika penulisan adalah:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan laporan, lokasi, waktu, jenis dan sumber data, serta sistematika penulisan laporan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan Sejarah UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang beserta visi misi, struktur organisasi, serta tugas dan fungsi kepegawaian di perusahaan.

### **BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Pada bab ini akan dijelaskan tentang teori yang mendukung penulisan penelitian serta membahas tinjauan praktek yang dilakukan berkaitan dengan judul penelitian.

### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan hal yang berkaitan dengan kesimpulan dan saran yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM UNIT KERJA TEMPAT PENELITIAN

#### 2.1 Sejarah UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang

Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar pada awalnya di bentuk berdasarkan SK gubernur kepala daerah Tingkat 1 Riau No.Kpts 29 januari 1974 dan dengan perkembangan pemerintah dalam rangka pelaksanaan pasal 49 ayat 2 UU No.5 Tahun 1979 tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah melalui perda No.5 Tahun 1997 di ubah menjadi Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dan sebagaimana terakhir dengan semangat otonomi daerah di dasarkan pada UU No. 22 Tahun 1999 di ubah menjadi Dinas Pendapatan Riau. Berdasarkan amanat PP No. 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah maka sebagai implementasinya ditetapkan perda Provinsi Riau No. 9 Tahun 2008 Dinas Pendapatan Daerah memiliki cabang yang bisa dikenal dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).

Pada peraturan Gubernur Riau No. 79 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dengan menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 dan pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017 tentang pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah dan melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Teknis Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Pada BAB II pembentukan pasal 2 dengan peraturan Gubernur ini di bentuk pada Badan Pendapatan Daerah, yaitu UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang Kelas A.

## 2.2 Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Bangking

Pada kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang terdiri beberapa unit kerja yang terdiri dari :

1. Kepala UPT
2. Kasubbag Tata Usaha
3. Kasih Penerimaan dan Penetapan
4. Kasih penagihan dan pembukuaan
5. Staf TU
6. Pendaftaran / Bagian Pelayanan
7. Bendahara khusus penerimaan
8. Bendahara khusus pengeluaran
9. Kasir

Gambar 2.1

## Struktur organisasi

**UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang**  
**Badan Pendapatan Provinsi Riau**



*Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.3 Visi dan Misi UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang

### a. Visi

Visi UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang sesuai dengan visi pusat yaitu : “Terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah provinsi riau melalui optimalisasi pemungutan serta pengelolaan Yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel dengan Pelayanan Prima”.

### b. Misi

1. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Meningkatkan tertib Administrasi Pengelolaan asli daerah.
3. Meningkatkan peningkatan Sumber Daya Manusia.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana.

## 2.4 Uraian Tugas Unit Kerja UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang

Adapun tugas pokok pada masing-masing bagian di UPT Penelolan Pendapatan Bangkinang adalah sebagai berikut :

### 1. Kepala UPT

- a. Memimpin pekerjaan secara keseluruhan di semua bidang, melakukan Sebagian kegiatan teknis oprasional dan / atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau Sebahagian daerah kabupaten atau kota dan bertanggung jawab kepada kepala badan pendapatan.

### 2. Kasubag Tata Usaha

- a. Mengatur dan mengkoordinir pemeliharaan kantor, keamanan UPT, melaksanakan pengelolaan Administrasi kepegawaian.
  - b. Menerima , menganalisis, dan mengendalikan administrasi surat menyurat UPT, mengetik , mengelolah, mencatat, dan mengadakan naska.
  - c. Melaksanakan Administrasi kepegawaian dan menghimpun serta Menyusun investarisasi data kepegawaian UPT.
  - d. Melaksanakan penyelesaian Administrasi gaji pegawai UPT, serta Menyusun rencana anggaran UPT.
3. Kasih Penerimaan dan Penetapan
    - a. Menyusun rencana kegiatan seksi penerimaan pendapatan UPT.
    - b. Melaksanakan pekerjaan dan kegiatan yang berkenan dengan penetapan pajak daerah, pemungutan dan penagihan pajak daerah di wilayah kerja UPT yang telah di tetapkan.
    - c. Membuat laporan realisasi penerimaan pajak daerah pada kantor SAMSAT, menerbitkan surat tagihan pajak daerah (STPD).
    - d. Membuat laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
  4. Kasih Penagihan dan Pembukuan
    - a. Membuat daftar himpunan pembayaran dan tunggakan pajak daerah, dan Menyusun laporan penerimaan pajak daerah masing-masing UPT.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan penagihan, pembukuan dan pelaporan UPT.
  - c. Melaksanakan perencanaan teknis di bidang penagihan dan pembukuan, serta pelayanan di bidang penagihan dan pembukuan.
5. Staf TU
  - a. Mengontrol persediaan SKPD, SPPKB, dan pelastik SKPD.
  - b. Membuat pengajuan permintaan blangko SKPD, SPPKB, dan pelastik SKPD.
  - c. Ekspedisi surat menyurat ke kantor dinas Provinsi Riau dan biro keuangan Pemprov Riau.
6. Pendaftaran / Bagian Pelayanan
  - a. Memberikan formulir surat pendaftaran dan pendataan pajak kendaraan bermotor (SPPKB) kepada wajib pajak setelah persyaratan lengkap .
  - b. Mengontrol penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) untuk Merk dan Type Kendaraan, mengentry data type kendaraan yang blm ada (kisong).
  - c. Korektor kutipan dan Surat Pajak Daerah (SKPD) Perpanjangan, Bea Balik Nama kendaraan Bermotor (BBNKB).
  - d. Mengentry data pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang belum ada (kosong) dari UPT Pendapatan Kota dan UP Pendapatan Kampar.
7. Bendaharaan Khusus Penerimaan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Melayani Penerimaan Pajak Daerah ( PKB, BB-KB, PKB Alat-alat Berat, BBN-KB Alat -alat Berat ,AP, SP3)
  - b. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya ( Menerima uang, menghitung dan menyetorkan uang pajak perpanjangan, diplikasi, rubah jenis, ganti nopol, BBNKB. Mutasu masuk dan keluar).
  - c. Mempertanggung jawabkan secara Administrasi atas pengelolaan uang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
8. Bendahara Khusus Pengeluaran
- a. Melayani belanja rutin Upt Pendapatan Bangkinang, mengarsipkan surat masuk dan keluar mengagendakan dan menindaklanjuti surat masuk dan keluar .
  - b. Membuat laporan pemakaian Anggaran Rutin UPT pendapatan Kampar, mengarsipkan surat masuk dan keluar.
9. Kasir
- a. Mempertanggung jawabkan penerimaan uang pajak kendaraan bermotor (PKB) Pengesan yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyetorkan uang tersebut kepada bendahara penerimaan pembantu, kasir penerimaan PKB dan BBN-KB pembayaran pajak tahunan.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### KESIMPULAN

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan penulis mengenai tentang Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Air Permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang bisa disimpulkan:

1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Air Permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang sudah berjalan dengan baik dalam melakukan pembayaran pajak terutangya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 28 hingga Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), dan peraturan gubernur riau no 37 tahun 2012.
2. Upaya yang di lakukan oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang dalam meningkatkan pemungutan Pajak Air Permukaan adalah pihak UPT menjalin hubungan yang sangat baik dengan wajib pajak Air permukaan Dimana sebelum tanggal jatuh tempo pihak UPT sudah menghubungi dan mengingatkan kepada wajib pajak, untuk tidak terlambat membayar pajak. Dan hampir setiap PT mebayar Pajak Air Permukaan jauh Sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran pajak, dan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
3. Disitu juga sudah terdapat himbauan atau peringatan kepada wajib pajak agar tidak terlambat untuk melakukan pembayaran Pajak Air Permukaan.

## 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis buat diatas, penulis menyadari keterbatasan dalam penelitian. Berikut saran dari penulis untuk peneliti selanjutnya, yaitu:

1. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat melibatkan lebih banyak sumber wawancara termasuk wajib pajak mendapatkan informasi yang lebih banyak mengenai Tingkat kepatuhan wajib pajak air permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang.
2. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya bisa menambah sumber becaan mengenai teori pajak air permukaan agar lebih lengkap.



## DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. (2019). Perpajakan Edisi 2019. Bulaksumur: Andi Yogyakarta.
- Mukhtar, U. (2021, 6 Selasa).
- Anggoro, Damas Dwi. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2017:140)
- Perpajakan Indonesia, Pengertian, Fungsi dan sistem pemungutan (online-pajak.com)
- <http://repository.stei.ac.id/5317/2/BAB%202.pdf>
- Fauziah. (2021). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Hiburan Jenis Karaoke di BAPENDA Pekanbaru. Pekanbaru: Repository.uin-suska.
- Fitria, D. (2017).
- Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Google Scholar, 30-44. Haskar, E. (2020).
- Hubungan Pajak dan Zakat Menurut Perspektif Islam. Google Scholar, 28-38. Keuangan, A. K. (n.d.). Jenis-jenis PAD. Retrieved from djpk.kemenkeu: <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq>
- Pandangan Islam Sal Memungut Pajak dari Rakyat, Bolehkah? Retrieved from Republika: <https://www.republika.co.id/berita/quouw0366/>
- pandangan-islam-soal memungut-pajak-dari-rakyat-bolehkah Ramadhan, A. S., & Nasution, J. (2022).
- Efektivitas Pemungutan Pajak Air Permukaan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatra Utara. Researchgate, 5. Resmi, S. (2017).
- Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10 Buku 1. Yogyakarta: Salemba Empat. S, R. N. (2021).
- Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha. Researchgate, 96-105. Setiawan, E. (2012).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Retrieved from kbbi.web.id: <https://kbbi.web.id/patuh> Setiawan, E. (2012).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Retrieved from kbbi.web.id: <https://kbbi.web.id/taat> 57 Siahaan, M. P. (2010).
- Konsep Pajak Dalam Hukum Islam. Google Scholar, 166-177.
- Syah, S. R. (2018). Tinjauan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Kantor SAMSAT Wilayah 1 Kota Makassar. Jurnal Administrare, 33-45.
- [https://bapenda.pekanbaru.go.id/layanan/pajak\\_abt](https://bapenda.pekanbaru.go.id/layanan/pajak_abt)

## Peraturan Perundang-Undangan

Tinjauan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Kantor SAMSAT Wilayah 1 Kota Makassar. *Jurnal Administrare*, 33-45.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Perundang-undangan Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Permukaan (PAP) Peraturan Gubernur Riau Nomor 37 Tahun 2012 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan Sebagai Dasar Pengenaan Pajak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menggantikan beberapa undang-undang sebelumnya. UU ini mencabut secara penuh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

## DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/61237  
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**

**1.04.02.01**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Penelitian dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-7029/Un.04/F.VII/PP.00.9/11/2023 Tanggal 24 November 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **NUR AISYAH**
2. NIM / KTP : **02170623758**
3. Program Studi : **D III ADMINISTRASI PERPAJAKAN**
4. Jenjang : **DIII**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK AIR PERMUKAAN DI UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG**
7. Lokasi Penelitian : **UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 19 Desember 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN  
 BANGKINANG

Jl. LETNAN HOYAK NO. 74 BANGKINANG  
 Website : www.badanpendapatan.dia.go.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 970/BAPENDA/UPT.05/145

Sehubungan dengan Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/61237 perihal Izin Pelaksanaan Kegiatan Riset /Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan LTA tanggal 19 Desember 2023, maka UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang dengan ini menerangkan nama mahasiswa/i di bawah ini :

Nama : NUR AISYAH  
 NIM /KTP : 02170623758  
 Program Studi : D-III Administrasi Perpajakan  
 Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU

Benar telah mengadakan penelitian di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang pada tanggal 17 Januari 2024 guna melengkapi data pada penyusunan Tugas Akhir yang berjudul : "Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Air Permukaan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Bangkinang Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 03 Mei 2024

Pih. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG  
 BARENDA PROVINSI RIAU,



**JUNAIDI, S.Sos**  
 Penata Tk.I  
 NIP. 19770721 201001 1 011

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN  
BANGKINANG

Jl. LETNAN BOYAK NO. 74 BANGKINANG  
Website : [www.badanpendapatan.riau.go.id](http://www.badanpendapatan.riau.go.id)

Bangkinang, 17 Januari 2024

Nomor : 970/BAPENDA/UPT.05/048-1  
Sifat : Biasa  
Tempat : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan  
Syarif Kasim Riau

Berdasarkan dengan Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/61237 perihal Izin Pelaksanaan Kegiatan Riset /Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan LTA tanggal 19 Desember 2023, perihal Izin Melaksanakan Penelitian :

Nama : NUR AISYAH  
NIM : 02170623758  
Program Studi : D-III Administrasi Perpajakan  
Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU

Sehubungan dengan hal diatas kami UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang, memberi izin kepada Mahasiswa/i nama yang tersebut diatas untuk melaksanakan Penelitian di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang Bapenda Provinsi Riau.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG  
BAPENDA PROVINSI RIAU,  
Kasi. Penagihan



M. JUNAIDI, S.Sos  
Penata Tk.I

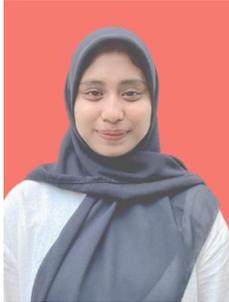
NIP. 19770721 201001 1 011

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIOGRAFI PENULIS



Nur Aisyah, lahir di Langgam pada tanggal 16 Oktober 2003.

Anak keEnam dari enam bersaudara, lahir dari pasangan ayahanda H.Muhammad Ali dan ibunda Hj. Jasmanidar.

Penulis mengawali Pendidikan di SDN 030 Pulau Permai pada tahun 2010-2016. Setela itu penulus melanjutkan Pendidikan

di MTSN 4 Kampar pada tahun 2016-2018 dan setelah itu penulis melanjutkan Pendidikan di SMAN 1 Kampar Timur pada tahun 2018-2021. Selanjutnya penulis meneruskan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil program studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2023.

Untuk menyelesaikan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau penulis mengajukan Tugas Akhir dengan judul “ **TINGKAT**

**KEPATUHAN**

**WAJIB PAJAK AIR PERMUKAAN DI UPT PENGELOLAAN  
PENDAPATAN BANGKINANG”.**